LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT
INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen pada tahun 2010, melebihi angka proyeksi nasional. Sepuluh persen dari laju pertumbuhan penduduk tersebut merupakan penduduk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang juga warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang dijamin oleh Undang-Undang.

Hak-hak penyandang disabilitas termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hak tersebut diantaranya:

1. Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan

f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Pasal 11

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

3. Pasal 13

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang ini telah mengamanatkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas secara menyeluruh, berkesinambungan. Penyediaan aksesibilitas tersebut adalah sebagai upaya untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, yaitu kegiatan untuk mengarahkan agar peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah. Pembinaan tersebut dilakukan dengan penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk didalamnya layanan informasi, fasilitasi dan konsultasi di bidang kesehatan, pendidikan,

ketenagakerjaan, dan layanan lainnya. Kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat juga dimaksudkan untuk menghilangkan stigma negatif, prasangka buruk, *stereotype* yang merugikan penyandang disabilitas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat khususnya dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa Penyandang Cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas. Semua hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas wajib diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan aksesibilitas yang dapat berbentuk diantaranya nonfisik meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

Menurut data Profil Penyandang Disabilitas di Indonesia yang diterbitkan bekerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dengan Biro Pusat Statistik pada tahun 2009 kondisi penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan berjumlah 2,13 juta jiwa atau 0,92 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah penyandang disabilitas laki-laki sebesar 1,13 juta (0,99 persen) sedangkan jumlah penyandang disabilitas perempuan sebesar 0,99 juta (0,85 persen). Walaupun ada jaminan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang diberikan Undang-Undang, namun kenyataannya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi penyandang disabilitas yang sekarang ini diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa sebagian besar dari mereka belum mendapatkan hak-haknya. Permasalahan yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak dapat mengakses informasi.

Penyandang disabilitas pada umumnya tidak dapat mengakses informasi dikarenakan tidak tersedianya format informasi yang dapat diakses sesuai dengan jenis disabilitasnya, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk

mengakses informasi dan kurangnya sosialisasi tentang pelayanan yang tersedia bagi perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya.

2. Masih rendahnya akses perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya terhadap berbagai layanan utama lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.

Belum dapat terpenuhinya pemenuhan hak dari perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya disebabkan karena belum adanya lembaga yang memberikan layanan informasi, konsultasi dan fasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyandang disabilitas. Karena berbagai permasalahan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya yang belum terpenuhi hak-haknya, maka diperlukan PIK-P2D yang memberikan layanan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya untuk memperoleh layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan pekerjaan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat. Dalam PIK-P2D ini selain memberikan layanan informasi dan konsultasi, tetapi juga dapat memberikan layanan fasilitasi kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya. Layanan fasilitasi ini penting dilakukan untuk menindaklanjuti layanan informasi yang diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya sehingga mereka dapat memperoleh haknya. Misalnya, apabila perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya datang ke PIK-P2D untuk mendapatkan informasi terkait dengan sekolah yang bisa menerima mereka, maka petugas PIK-P2D dapat memfasilitasi mereka untuk diterima di sekolah tersebut.

Selanjutnya, agar PIK-P2D dapat memberikan layanan yang berkualitas baik itu layanan informasi, konsultasi maupun fasilitasi kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya, perlu disusun SOP PIK-P2D yang dapat dijadikan acuan petugas PIK-P2D dalam memberikan layanan pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud:

SOP PIK-P2D ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas PIK-P2D, Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat, maupun lembaga-lembaga lain yang memberikan layanan informasi, konsultasi, dan fasilitasi kepada perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya.

Tujuan:

Tujuan dari SOP PIK-P2D ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, konsultasi dan fasilitasi di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya bagi perempuan penyandang disabilitas pada umumnya maupun penyandang disabilitas lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari SOP PIK-P2D ini meliputi layanan informasi, konsultasi dan fasilitasi di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya.

D. Sasaran

1. PIK-P2D.
2. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.